I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Daerah perkotaan yang tumbuh dengan pesat, khususnya di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, telah menimbulkan permasalahan yang rumit, karena kota harus menanggung beban berat akibat tingginya tingkat pertambahan penduduk yang mayoritas akibat migrasi. Isu dan masalah perkotaan di negara-negara yang sedang berkembang pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya sangat kompleks dibandingkan dengan yang terjadi di negara-negara industri maju

Saat ini penduduk perkotaan terus bertambah, yang pada prinsipnya menurut Rukmana (2003:32) dikarenakan 3 faktor yang menyebabkan pesatnya pertumbuhan penduduk perkotaan di Indonesia yakni pertambahan penduduk alamiah penduduk perkotaan, migrasi dari desa ke kota, dan reklasifikasi desa-kota. Dengan pesatnya pertumbuhan penduduk tersebut di atas sudah barang tentu akan meningkatkan pula beban yang harus dipikul oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang diharapkan dapat memenuhi keinginan penduduk perkotaan seperti tersedianya lapangan pekerjaan, perumahan, fasilitas kesehatan, fasilitas air minum, pembuangan sampah, perbaikan kampung dan lain sebagainya.

Implikasi yang timbul akibat pesatnya pertumbuhan kota, pemerintah seringkali gagal atau mengalami kegagalan dalam memperluas penyediaan air bersih, perumahan dan tarnsportasi serta sistem sanitasi yang tidak terjaga. Hal senada juga diakui oleh pemerintah, bahwa meskipun telah banyak usaha yang telah dilakukan namun fasilitas sanitasi seperti pembuangan sampah, drainase, sanitasi *on side*, sanitasi off side masih dirasakan buruk (Kompas, 2009).

Dengan semakin pesatnya pertambahan penduduk perkotaan lebih cepat dari kemampuan pemerintah, maka diperkirakan pada dasawarsa yang akan datang sekitar 54 juta orang (71,3%) penduduk perkotaan masih belum dapat terlayani oleh fasilitas yang memadai. Dari beberapa masalah pelayanan perkotaan tersebut akhir-akhir ini masalah penanganan sampah di perkotaan menjadi masalah yang cukup serius dirasakan mengingat volumenya yang kian hari kian membengkak atau bertambah sementara kemampuan aparat pemerintah dalam melayani sangat terbatas. Hal ini berkaitan dengan laju pertumbuhan penduduk yang terus bertambah dari waktu ke waktu beserta aktivitasnya menyebabkan meningkatnya sampah bukan hanya dalam jumlah sampah tetapi juga dari variasi komposisi sampah, disamping itu diperkuat juga dengan kecenderungan masyarakat modern untuk menghasilkan berbagai macam sampah khususnya perilaku hidup masyarakat kota-kota besar di Indonesia, seperti halnya Jakarta, Bandung, Surabaya, atau bahkan kota Metropolitan seperti Kota Bandarlampung.

Permasalahan sampah telah mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, sehingga telah menempatkannya sebagai salah satu isu utama bagi pemerintah kota di seluruh Indonesia. Pertumbuhan sampah terjadi seiring dengan laju

pertumbuhan penduduk yang terus bertambah secara alami. Pertumbuhan penduduk yang demikian besar sudah barang tentu akan menjadi masalah bagi kota-kota besar, terutama jika dilihat dari jumlah timbunan sampah yang besar, serta pencemaran yang akan diakibatkan oleh tumpukan sampah yang tidak terangkut. Oleh karena itu pemerintah kota dituntut untuk dapat mengatasi masalah ini sebaik-baiknya, agar tidak sampai pada tahaf mencemari lingkungan .

Pemerintah hendaknya mencermati secara khusus kebijakan pengelolaan sampah ini, karena dalam penanganan sampah pemerintah harus menganggarkan secara khusus, hal ini berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Cointreau (dalam Urban Management Programme, 2004:12) yang menyatakan bahwa untuk menghitung biaya penghimpunan persampahan kota dapat dilakukan sebagai berikut, semakin tinggi pendapatan penduduk maka semakin tinggi pula biaya penghimpunan sampahnya, hal ini dikarenakan upah-upah dalam pengelolaan sampah juga menjadi tinggi. Untuk itu pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus memperhatikan masalah pengelolaan sampah ini dengan baik, dengan manajemen pengelolaan sampah sesuai standar yang telah ditetapkan. Dan mulai memperhatikan pengelolaan sampah ini dengan memperhatikan kelembagaan khusus yang bertanggung jawab akan pengelolaan sampah, dengan anggaran (biaya) yang khusus pula dan yang juga penting untuk diperhatikan adalah masalah tehnis operasional dalam pengelolaan sampah, termasuk diantaranya dalam peletakan TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Pemerintah harus membuat program kebersihan kota dan penanggulangan sampah secara berkesinambungan.

Program kebersihan kota dan penanggulangan sampah pada umumnya sudah dilaksanakan oleh hampir semua pemerintah daerah kota/kabupaten di seluruh nusantara, termasuk Kota Bandarlampung. Sebagai ibukota Provinsi Lampung Kota Bandarlampung telah mengalami perkembangan pesat, perkembangan ini tentu saja diikuti pula dengan permasalahan khas perkotaan. Kota ini memiliki luas 207,50 km² dengan populasi penduduk sebanyak 879.651 jiwa (sensus 2010); kepadatan penduduk 4.597 jiwa/km² dan tingkat pertumbuhan penduduk 3,79 % per tahun. Secara geografis, ibukota provinsi Lampung ini berada di pintu gerbang utama pulau Sumatera, tepatnya kurang lebih 165 km sebelah barat laut DKI Jakarta.

Data tahun 2010 menunjukan bahwa potensi sampah di Kota Bandarlampung mencapai lebih dari 1000 meter kubik/hari. Jumlah tersebut didapat dari data bahwa sampah yang dibuang masyarakat Bandarlampung yang berjumlah lebih kurang 800.000 ribu jiwa rata-rata adalah 2 liter/hari masing-masing rumah. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 25% saja yang baru bisa dikelola oleh pemerintah kota Bandarlampung (Lampost, 2010).

Sampai dengan saat ini Kota Bandarlampung, masih menghadapi permasalahan dalam mengatasi pengelolaan sampah, karena banyaknya timbunan sampah yang tidak dapat terangkut semuanya ke TPA. Tingkat kompleksitas masalah penanganan sampah ini, tidak terlepas dari implikasi masalah-masalah sebagai berikut: (1) Pesatnya pertumbuhan kota. (2) Pesatnya/cepatnya pertambahan penduduk di kota, akibatnya makin banyak pula sampah yang dihasilkan. (3) Tuntutan penyediaaan fasilitas publik perkotaan. (4) Keterbatasan kemampuan

pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang baik termasuk dalam pengelolaan sampah. (5) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, rendahnya partisipasi dalam membayar retribusi layanan kebersihan.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandarlampung merupakan birokrasi instrumen untuk bekerjanya manajemen dalam pengelolaan sampah ini. Dimana birokrasi bekerja berdasarkan pembagian kerja, hirarki kewenangan, impersonalitas hubungan, pengaturan perilaku, dan kemampuan teknis dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara administrasi pemerintahan. Baik-buruknya pelayanan publik yang diberikan oleh birokrasi sangat terkait dengan kemampuan dan kualitas dari birokrasi itu sendiri. Kemampuan birokrat pemerintahan selain dibentuk melalui pengembangan dan peningkatan pengetahuan dan keahlian individu juga sangat dipengaruhi oleh sistem organisasi tersebut seperti orientasi kerja, struktur organisasi, model kepemimpinan serta renumerasi yang diterima oleh aparatur. Hal lain yang menjadi penyebab mendasar adalah dimana proses rekruitmen pegawai baru seringkali mengabaikan aspek meritokrasi dan kebutuhan organisasi. Tidaklah mengherankan jika dalam praktek, birokrasi Indonesia sering kewalahan dalam mengantisipasi setiap perubahan dan aspirasi baru. Dampak dari itu adalah terjadinya penurunan mutu kerja organisasi dan mutu pelayanan publik.

Dengan melandaskan pemikiran terhadap permasalahan yang dihadapi oleh aparatur birokrasi Indonesia maka sebagai upaya untuk memperbaiki berbagai kelemahan dan mengantisipasi perubahan lingkungan maka diperlukan sebuah

pemikiran untuk membangun aparatur birokrasi Indonesia yang handal, profesional dan menjunjung tinggi nilai kejujuran serta etika profesi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara kegiatan pembangunan dan penyelenggara pelayanan publik. Mengingat urgensitas peran aparatur dalam menyelenggarakan peran dan fungsinya, perlu kiranya dicari dan dirumuskan suatu pendekatan strategis untuk membangun wajah baru aparatur profesional yang handal, tanggap, inovatif fleksibel dan tidak prosedural dalam memberikan pelayanan dan penyelenggaraan pembangunan.

Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandarlampung sebagai salah satu instansi publik bertugas menyelenggarakan pelayanan pengelolaan sampah, tata kebersihan dan pertamanan keindahan kota menjadi ujung tombak terdepan dalam mengatasi permasalahan tersebut di atas. Manajerial organisasi yang baik akan melahirkan sumber daya manusia yang profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya, responsivitas dan inovasi pemikiran dan tindakan solusi akan muncul manakala adanya rasa tanggungjawab.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan menfokuskan pada masalah sebagai berikut: *Bagaimanakah profesionalisme aparatur pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandarlampung dalam menjalankan tugas dan fungsinya?*

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melihat profesionalisme aparatur pegawai Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandarlampung dalam menjalankan tugas

dan fungsi organisasi dari aspek responsifitas, kreatifitas, dan inovasi dalam hal pengelolaan sampah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan, terutama bagi mereka yang tertarik terhadap permasalahan profesionalisme aparatur pemerintahan dalam kajian ilmu pemerintahan.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandarlampung tentang langkah-langkah strategis dalam meningkatkan profesionalisme aparatur pegawainya.